

**HUBUNGAN ORIENTASI AGAMA TERHADAP KANDIDAT,
ORIENTASI KEANGGOTAAN TERHADAP ORGANISASI
KANDIDAT DAN IDENTIFIKASI PARTAI TERHADAP
PERILAKU MEMILIH MUBALLIGH PADA PILKADA
LANGSUNG KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2007**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Ilmu Politik Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh:

WENNY LESTARI

04 193 044



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRAK

Wenny Lestari, 04193044, skripsi dengan judul **Hubungan Keanggotaan Organisasi Kandidat, Orientasi Agama Kandidat dan Identifikasi Partai dengan Perilaku Memilih Mubaligh pada Pilkada Langsung Kota Payakumbuh tahun 2007. Sebagai Pembimbing I Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS dan Pembimbing II Doni Hendrik, S.IP, M.Soc.Sc.** Skripsi ini terdiri dari halaman dengan referensi buku, skripsi, disertasi, laporan penelitian, situs internet, undang-undang dan peraturan lainnya.

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemilihan Kepala Daerah di setiap propinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005. Sedangkan di Payakumbuh Pemilihan Kepala Daerah Langsung dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2007.

Penelitian ini menggunakan teori perilaku memilih (*voting behavior*) dengan menggunakan variable Keanggotaan Organisasi Kandidat, Orientasi Agama Kandidat dari mazhab sosialis dan Identifikasi Partai dari mazhab psikologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif (menggambarkan). Data dikumpulkan menggunakan kuisioner dengan teknik wawancara langsung terhadap responden (*face to face interview*). Dalam penelitian ini digunakan sampel total. Selanjutnya dalam analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS 16.0, uji hipotesisnya menggunakan *Chi-Square* dan *Coefficient of Contingency*.

Dari penganalisaan *Chi-Square* dan *Coefficient of Contingency*, peneliti menemukan bahwa orientasi agama terhadap kandidat dan orientasi keanggotaan terhadap organisasi kandidat mempengaruhi perilaku memilih mubaligh pada pilkada langsung kota Payakumbuh Tahun 2007. Sedangkan identifikasi partai tidak mempengaruhi perilaku memilih mubaligh pada pilkada langsung kota Payakumbuh Tahun 2007. Hubungan orientasi agama terhadap kandidat dengan perilaku memilih merupakan hubungan positif yang sedang dengan nilai *Coefficient of Contingency* sebesar 0,340 dan orientasi keanggotaan terhadap organisasi kandidat dengan perilaku memilih merupakan hubungan positif yang sedang dengan nilai *Coefficient of Contingency* sebesar 0,491. Penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan, sebab masih ada variable lain yang dapat mempengaruhi perilaku memilih mubaligh pada pilkada langsung kota Payakumbuh Tahun 2007.

Kata Kunci: *perilaku memilih, mubaligh, orientasi agama terhadap kandidat, orientasi keanggotaan terhadap organisasi kandidat, identifikasi partai, pilkada langsung.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode Orde Baru (Orba) dapat dicatat sebagai periode kelam bagi sejarah desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pada masa ini, pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan apapun. Mereka dalam melaksanakan pemerintahannya harus berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat melalui Mendagri. Ini terjadi tidak terlepas dari azas sentralisasi yang diberlakukan dalam mengelola pemerintahan di daerah-daerah. Sebagai wujud dari sentralisasi ini, kepala daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu lalu setiap kepala daerah yang akan dipilih oleh DPRD harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.

Berakhirnya rezim orde baru pada tahun 1998, merupakan langkah baru bagi bangsa Indonesia untuk kembali membangkitkan semangat dan prinsip-prinsip demokrasi demi mewujudkan suatu Indonesia baru. Indonesia yang lebih demokratis, yaitu dengan mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat. Hal ini terwujud dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pada tanggal 7 Mei 1999 dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2000. Akan tetapi paradigma dan materi yang terkandung dalam UU No. 22 Tahun 1999 masih bernuansa federalistik, sehingga oleh sementara kalangan masih dianggap tidak sesuai dengan semangat negara kesatuan serta UU ini juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan keragu-raguan daerah untuk

melakukan pembaharuan. Tidak mengherankan pada masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tersebut, tersebar isu politik uang karena besarnya wewenang DPRD dalam proses pemilihan kepala daerah¹.

Oleh karena itu, dilakukan penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999 tersebut. Penyempurnaan itu dilakukan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Maksud penyelenggaraan otonomi daerah dengan UU No. 32 Tahun 2004 adalah untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga eksekutif (kepala daerah) merupakan unsur yang paling penting. disamping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya.

Kini melalui UU No. 32 Tahun 2004, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tidak lagi melalui DPRD, melainkan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan kepala daerah langsung ini dilakukan antara lain, untuk memutus mata rantai oligarki partai yang mewarnai kepolitikan di DPRD dimana kepentingan partai bahkan kepentingan segelintir elit partai kerap manipulasi kepentingan masyarakat secara luas. Dengan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah, hal itu disebabkan karena ia dipilih secara langsung oleh rakyat.

¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT Raja Persada, Jakarta, 2005, hlm 55

BAB VII

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Begitu juga halnya dengan Kota Payakumbuh.

Pada pilkada langsung kota Payakumbuh yang lalu peneliti melihat suatu hal yang menarik, yaitu pasangan Yosrizal dan Syamsul yang terpilih merupakan pasangan yang di usung oleh PPP, padahal berdasarkan pemilu legislatif yang lalu, PPP bukanlah partai pemenang di Payakumbuh. Dalam pilkada yang lalu Golkar dan PAN berkoalisi untuk mengusulkan calon, tetapi akhirnya pasangan Josrizal-Syamsul berhasil mengalahkan kandidat yang di usung oleh partai besar dan berkoalisi tersebut. Bahkan suara yang diperoleh oleh pasangan Josrizal-Syamsul ini cukup signifikan yaitu mendekati 50%. Tidak hanya itu Josrizal-Syamsul juga merupakan calon yang bukan muballigh, padahal partai yang mengusung mereka adalah PPP yang merupakan partai islam.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat perilaku memilih muballigh payakumbuh yang tergabung dalam Korok Muballigh. Dengan menggunakan variabel orientasi agama terhadap kandidat, orientasi keanggotaan terhadap organisasi kandidat dan identifikasi partai. Orientasi agama terhadap kandidat diukur melalui: pengetahuan tentang latar belakang agama kandidat, ketertarikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku teori

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Aziz Al-Badri, Abdul dan Mujio. 2005. *Politik Ulama Dalam Menghadapi Penguasa Islam*. Pustaka Setia. Bandung.
- Agus, Bustanuddin. 2007. *Islam dan Pembangunan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Gaffar, Affian. 2000. *Politik Indonesia Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Jakarta
- Haryanto. 1084. *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*, Liberty. Yogyakarta
- Huntington, Samuel P, dan Joan M. Nelson. 1994. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rinca Cipta
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Plano, Jack. 1985. *Kamus Analisa Politik*, Rajawali. Jakarta
- Witoelar, Wimar, 1999. *Menuju Partai Orang Biasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum

Buku metodologi

- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta. Kencana
- Mardalis, 2006. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Prasetio, Bambang dan Linnah Miftahul Jannah, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: teori dan Apilkasi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Singarimbun, Masri dan Soffian effendi (ed). 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES

Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian

- Asrinaldi,dkk. 2003. " Political Response dan perilaku memilih Masyarakat Miskin Perkotaan 1999-2004: Kajian tentang Preferensi Politik, Indikasi